

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adjie, H. (2018). *Hukum Notaris Indonesia*. Refika Aditama.
- Anshori, A.G. (2006). *Hukum perwakafan di Indonesia*. Gajah Mada University Press.
- Arba & Mulada, D.A. (2021). *Hukum Hak Tanggungan: Hak Tanggungan atas tanah dan benda-benda di atasnya*. Sinar Grafika.
- Ashibly. (2018). *Buku ajar hukum jaminan*. MIH Unihas.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. & Safa'at, M.A. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang hukum*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Budiono, H. (2010). *Kumpulan tulisan hukum perdata di bidang kenotariatan*. Citra Aditya Bakti.
- Harsono, B. (2008). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*. Djambatan.
- Hasbullah, F.H. (2005). *Hukum kebendaan perdata: Hak-hak yang memberi jaminan*. Ind-Hill-co.
- Isnaeni, M. (2016). *Pengantar hukum jaminan kebendaan*. Revka Petra Media.
- J. Satrio. (2002). *Hukum jaminan, hak jaminan kebendaan*. Citra Aditya Bakti.
- Kansil, C.S.T. & Kansil, C.S.T. (2014). *Pengantar ilmu hukum*. Rineka Cipta.
- Kasmir. (2004). *Manajemen perbankan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kelsen, H. (2009). *Dasar-dasar hukum normatif*. Nusamedia.
- Khoidin, M. (2017). *Hukum jaminan: Hak Tanggungan dan eksekusi Hak Tanggungan*. Laksbang Yustitia.
- Mahfud MD, M. (2012). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.

- Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Cahaya Atma Pusaka.
- Mertokusumo, S. (1999). *Hukum perdata tentang hak kebendaan*. Liberty.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Muljadi, K. & Widjaja, G. (2005). *Hak Tanggungan*. Kencana Prenada Media Group.
- Parlindungan, A.P. (1999). *Pendaftaran tanah di Indonesia*. Mandar Maju.
- Patrick, P. & Kashadi. (2009). *Hukum jaminan*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Perangin, E. (1994). *Hukum agraria di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Poesoko, H. (2007). *Parate executie objek Hak Tanggungan*. LaksBang Pressindo.
- Prasetyo, T. (2015). *Keadilan bermartabat*. Nusa Media.
- Pugung, S. (2021). *Perihal tanah dan hukum jual belinya serta tanggung jawab PPAT terhadap akta yang mengandung cacat perspektif negara hukum*. Budi Utama.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum (Cet. VIII)*. Citra Aditya Bakti.
- Salim, H.S. (2014). *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Sembiring, J.J. (2017). *Cara menyelesaikan sengketa tanah*. Visimedia.
- Setiawan, R. (1987). *Pokok-pokok hukum perikatan*. Bina Cipta.
- Setiawan, R. (2001). *Pokok-pokok hukum perikatan*. Binacipta.
- Simorangkir, J.C.T. & Sastropranoto, W. (2020). *Pengantar sistem hukum Indonesia*. LoGoz Publishing.
- Sjahdeini, S.R. (1999). *Hak Tanggungan: Asas-asas, ketentuan-ketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh perbankan*. Alumni.
- Sofwan, S.M. (1981). *Hukum perdata: Hukum benda*. Liberty.

- Sofwan, S.M. (2003). *Hukum jaminan di Indonesia: Pokok-pokok hukum jaminan dan jaminan perorangan*. Liberty Offset.
- Soeroso, R. (2007). *Pengantar ilmu hukum*. Sinar Grafika.
- Subekti, R. (2005). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Supramono, G. (1996). *Perbankan dan masalah kredit: Suatu tinjauan yuridis*. Djambatan.
- Sumardjono, M.S.W. (2008). *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Kompas.
- Santoso, U. (2014). *Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah*. Kencana Perdana Media Group.
- Santoso, U. (2015). *Hukum agraria: Kajian komprehensif*. Kencana.
- Santoso, U. (2016). *Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah*. Kencana.
- Sutedi, A. (2018). *Hukum Hak Tanggungan*. Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2018). *Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya*. Sinar Grafika.
- Usman, R. (2001). *Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, R. (2009). *Hukum jaminan keperdataan*. Sinar Grafika.
- Usman, R. (2011). *Hukum kebendaan*. Sinar Grafika.

Jurnal dan Artikel Ilmiah :

- Badriyah, S.M. (2016). Problematika pembebanan Hak Tanggungan. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(3), 173–180.
- Badriyah, S.M. (2019). Implikasi hukum penggunaan surat kuasa membebankan Hak Tanggungan. *Law Development and Justice Review*, 58.
- Bangun, B.S. & Widjaja, G. (2025). Asas publisitas Hak Tanggungan dalam mewujudkan kepastian hukum: Kajian terhadap peletakan sita terhadap tanah yang telah bersertifikat Hak Tanggungan. *Jurnal Sosial dan Teknologi*, 5, 4359.

- Fuady, M. (2013). *Perbuatan melawan hukum: Pendekatan kontemporer*. Citra Aditya Bakti.
- Halim, S., Yamin, M., Kalo, S., & Siahaan, R.H. (2022). Pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 451.
- Harahap, M.Y. (2006). *Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata*. Sinar Grafika.
- Harahap, M.Y. (2017). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika.
- Harahap, M.Y. (2019). *Hukum perjanjian: Asas, teori dan praktik*. Sinar Grafika.
- Hasanah, H. Perlindungan konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen atas kendaraan bermotor dengan fidusia. *Jurnal InFestasi*.
- Liwandi, R. & Lukman, F.X.A. (2023). Perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan akta jual beli batal demi hukum (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1615 K/PDT/2020). *Wajah Hukum*, 7(2), 396–406
- Mastang, A. & Muskibah. (2022). Akibat hukum akta jual beli yang dibatalkan oleh pengadilan terhadap pembeli yang beritikad baik. *Recital Review*, 4(2), 376.
- Nurjihad. (2018). Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dalam sistem pendaftaran tanah Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 6(3), 418.
- Taufano, M.A.G. & Silalahi, W. (2024). Konsekuensi Hak Tanggungan perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. *UNES Law Review*.
- Warsidi, Suhartono & Swadjaja, I. (2025). Tinjauan hukum Islam terhadap interseksi Hak Tanggungan atas tanah dan hukum perwakafan. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 10(2).
- Winarno, B. (2019). Tanggung jawab PPAT terhadap akta jual beli yang cacat hukum. *Jurnal Notarius*, 12(1), 102.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893).
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Putusan Pengadilan dan Yurisprudensi :

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1987). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 3309 K/Pdt/1985* tanggal 29 Juli 1987.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Dputanggal 29 Mei 2019*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 130/PDT/2019/PT MTR* tanggal 10 September 2019.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 1615 K/Pdt/2020* tanggal 8 Juli 2020.

Kode Etik dan Peraturan Organisasi :

Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. *Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT)*, Pasal 3 huruf F dan Pasal 6 ayat (1).

